



JAMBURA JOURNAL CIVIC EDUCATION
<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php./jacedu>
E-ISSN : 2798-4818
P-ISSN: 2808-2249

**POLITIK IDENTITAS:
(POLA KOMUNIKASI POLITIK TIM ELNINO CENTER PADA PERHELATAN PEMILU
LEGISLATIF TAHUN 2019)**

Sofyan Alhadar¹, Zulfikar Adjie² Kurniadi Hasan³

^{1,3} Fakultas Administrasi dan Ilmu Sosial, Universitas Bina Taruna

² Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

(alhadsof21@gmail.com)

(zulfikaradjie@ung.ac.id)

(yadiehz@gmail.com)

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima (Nov) (2022)

Disetujui (Nov) (2022)

Dipublikasikan (Nov)
(2022)

Keywords:

Konstitusi Pemilu; Pola
Komunikasi Politik; Rumah
Ibadah;

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sejauh mana strategi komunikasi politik yang dibangun oleh Tim Elnino Center pada perhelatan pemilu legislatif tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun lokasi penelitian bertempat di Wilayah Kota Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pola komunikasi politik Tim Elnino Center di rumah ibadah (masjid) yang dapat diidentifikasi melalui stiker elnino center yang terletak di bagian-bagian aksesoris masjid. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, secara eksplisit pola komunikasi politik yang dibangun bertentangan dengan konstitusi pemilu No 8 Tahun 2015 hal itu dikarenakan, penggunaan stiker calon elnino dalam proses pelaksanaannya masih didapati pengurus masjid enggan melepaskan disaat proses pemilihan berlangsung.

2022 Universitas Negeri Gorontalo
Under the license CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Partisipasi Politik pada negara demokrasi termasuk pada penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang sah oleh rakyat, pemilu sering dikatakan sebagai suatu tatanan demokrasi serta mewujudkan kedaulatan rakyat demi menghasilkan wakil

¹ Dosen Universitas Bina Taruna Gorontalo

² Dosen Universitas Negeri Gorontalo

³ Dosen Univeristas Bina Taruna Gorontalo

rakyat serta pemimpin yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Pada hakekatnya pemilu demokratis telah menjadi sebuah budaya bagi perpolitikan Indonesia. Berkaitan dengan budaya politik dalam hal ini. Berkaitan dengan pemilihan umum, (Wardhani, 2018) mengemukakan bahwa pemilu merupakan proses demokrasi yang dilaksanakan baik itu di negara maju yang sudah matang demokrasinya, maupun di negara berkembang yang demokrasinya masih dalam tahap transisi yang berorientasi hasil yang didasari pada pilihan rakyat sebagai pemegang hak penuh kekuasaan.

Berkaitan dengan pemilu, Indonesia adalah salah satu negara yang sangat mengedepankan hak demokrasi dalam pemilu. Pada kontestasi politik pada pemilu tahun 2019, menyimpan banyak misteri dibalik kemenangan para tokoh politik. Misteri itu terungkap dengan adanya temuan kampanye hitam di tempat-tempat ibadah. Jumlah pelanggaran itu berada di angka 176.493. Tak ada yang salah dengan hal itu, namun secara konstitusi terkait undang-undang pemilu telah jelas bahwa dalam pasal 69 UU RI No 8 Tahun 2015 melarang adanya para tokoh politik melakukan kampanye di rumah ibadah. Namun hal itu justru tidak berlaku bagi mereka yang ingin mendapatkan kekuasaan.

Sejalan dengan kasus diatas, pola kampanye politik yang memanfaatkan rumah ibadah juga digambarkan melalui tokoh politik tim elnino center yang melakukan kampanye samar-samar (tidak terlihat tapi nyata) di beberapa masjid yang berada di wilayah kota Gorontalo. Hal sejalan dengan program unggulan elnino center dimana mereka berjanji akan merenovasi 130 masjid di kota Gorontalo dengan konsep “digi mosque” atau dalam Bahasa yang sederhana masjid berbasis digital yang dimana semua fasilitas menggunakan teknologi.

Dari program yang ditawarkan ini tak ada yang salah, namun pertanyaannya adalah stiker elnino center telah menjadi sebuah panorama baru di dalam ruangan masjid. Secara rasional bahwa, konsep “simbiosis mutualisme” kemungkinan besar akan terjadi. Dimana masjid akan mendapatkan fasilitas, juga bagi tim elnino center akan meningkatkan elektabilitas. Persepsi yang berkembang di masyarakat saat ini adalah kebaikan akan dibalas dengan kebaikan (Good will be rewarded with kindness) begitupun dengan keburukan akan dibalas dengan keburukan (Bad things will be rewarded with ugliness). Stigma inilah terkadang menjadi senjata para elit politik yang

menggabungkan nuansa agama demi kepentingan politik. Oleh karena itu, tidak heran bagi sebagian para tokoh politik melakukan strategi-strategi khusus demi mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Covert dan Wesburn (Bashori, 2018) mengemukakan bahwa, Legitimasi atas keyakinan (agama) memiliki peran khusus dalam menentukan seorang pemimpin. Artinya, agama adalah sebuah “isyarat” terkait tentang akidah dan tempat beribadah adalah praktik secara nyata untuk mengaktualisasikan konsep akidah itu. Sehingga apabila seseorang memiliki keyakinan agama yang kuat misalnya islam, maka mereka (masyarakat) akan cenderung meyakini bahwa setiap kebaikan yang diaktualisasikan oleh seseorang dalam bentuk tindakan merupakan gambaran yang nyata bagi mereka. dan hal itu akan memberikan rasa simpati bagi mereka yang melihatnya.

Kecenderungan atas interaksi politik yang dilakukan di tempat ibadah akan memberikan pengaruh terhadap kesiapan secara individu dan kelompok dalam hal partisipasi politik (Bashori, 2018). Strategi politik yang terjadi saat ini, cukup memberikan gambaran kepada kita bahwa tempat ibadah memiliki peranan penting dalam sepak terjang tokoh politik. (Yunus, 2019) mengemukakan bahwa, berkaitan dengan pilihan politik masyarakat terhadap figur politik, selain ditentukan oleh faktor sosiologis, psikologis dan rasional, juga sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan yang didalamnya terdapat interaksi secara langsung dalam kesehatan masyarakat itu sendiri.

Atas argumentasi tersebut, kemungkinan besar skenario terburuknya adanya interaksi politik di rumah-rumah ibadah misalnya masjid seperti pernyataan Bashori dalam tulisannya yang berjudul “pendidikan politik di era disrupsi”. Dalam hal ini, penulis mengambil sebuah perbandingan mengapa tempat ibadah sering dijadikan sebagai tempat interaksi politik saat ini. Hal itu dikarenakan oleh beberapa alasan diantaranya :

1. Berdasarkan keyakinan mayoritas penduduk indonesia khususnya penduduk Gorontalo mayoritas muslim. Sehingga keseharian mereka akan berurusan dengan ibadah sholat lima waktu dalam sehari. Logisnya adalah, setiap hari masjid akan di huni dengan orang yang berbeda dari berbagai kalangan. Sehingga potensi figur politik akan sangat mudah dikenal apabila elit politik menggunakan rumah ibadah sebagai media kampanye baik dalam bentuk pamflet, poster yang di

tempelkan di bangunan masjid yang dibalut dengan konsep bantuan atas dasar hibah (sedekah) untuk pembangunan masjid.

2. Kecenderungan persaingan tempat ibadah dengan konsep yang mewah (berbasis digital) saat ini membuat para pengurus (ta'mirul masjid) tergiur menerima para donatur tanpa mempertimbangkan, menganalisis dan melihat lebih jauh dampak apa yang akan ditimbulkan.

Kehadiran pencitraan dalam dunia politik akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi setiap kandidat politik. Hal ini dikarenakan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam mempromosikan diri serta masyarakat akan lebih cenderung memilih berdasarkan persepsi dengan apa yang mereka lihat apabila itu bersesuaian dengan akidah mereka (Abdillah, 2013). Oleh karena itu, Persepsi akan terbentuk melalui opini atas dasar investasi dari kebaikan kandidat politik baik dalam bentuk materil dan support sistem (Azhar, 2017).

Pada prinsipnya tak ada yang bisa memilah mana niat kebaikan dalam bentuk real dan mana kebaikan yang berselubung kepentingan politik. Berkaitan dengan politik pencitraan. Berdasarkan permasalahan diatas, tulisan ini akan membahas tentang Politik Pencitraan Tim Elnino Center Melalui Rumah Ibadah di Kota Gorontalo dengan menggunakan pendekatan Perspektif UU RI No 8 Tahun 2015.

Politik identitas sebetulnya telah banyak diteliti. Misalnya menurut Muhammad Habibi dengan judul Analisis Politik Di Indonesia menjelaskan bahwa politik identitas yang sering muncul ke permukaan sejarah modern Indonesia harus ditangani dan dikawal secara bijak oleh nalar historis yang dipahami secara benar dan cerdas. Saat proklamasi, jumlah penduduk Indonesia adalah sekitar 70 juta; sekarang di awal abad ke-21 sudah menjadi sekitar 250 juta, membengkak lebih tiga kali lipat sejak 1945, telah muncul sebagai bangsa terbesar keempat di dunia sesudah Cina, India, dan Amerika Serikat. Dengan masyarakat yang terdiri dari beranekaragam etnis, agama, dan budaya yang berbeda, masyarakat Indonesia dapat saling menghargai dan toleransi antar perbedaan yang ada (habibi, 2018).

Penelitian selanjutnya yaitu tentang Politik identitas dalam pemilu 2019 menurut Arya Fernandes, Untuk kali pertamanya dalam sejarah pemilu di Indonesia, akan digelar pemilu presiden dan pemilu legislatif serentak pada hari yang sama. Survei-survei yang

dilakukan CSIS di lima provinsi pada Pilkada 2018 lalu memperkirakan kontestasi ketat antara Jokowi dan Prabowo diperkirakan akan terjadi di Jawa Barat dan Sumatera Utara. (fernandes, 2018).

Persamaan penelitian ini dengan dua penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh (habibi, 2018) berfokus pada politik identitas internasional yang diteliti di berbagai negara. Setiap negara politik identitasnya bergantung pada sebaran agama, ras, dan etnis. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (fernandes, 2018) berfokus pada politik identitas yang terjadi pada pilkada di jawa barat dan sumatera. Sedangkan penelitian ini sama-sama meneliti tentang politik identitas tetapi fokus pada Komunikasi politik tim elnino center pada perhelatan pemilu legislatif tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menarik untuk dikaji.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penulisan ini, menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan studi kasus. Sugiono mengemukakan bahwa penelitian studi kasus merupakan sebuah instrumen penelitian yang lebih memfokuskan pengembangan sumber informasi atas program, peristiwa serta aktivitas kerja yang ingin diteliti (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini fokus kasus yang dijadikan sebagai permasalahan yaitu pemilihan anggota legislatif pada tahun 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pola Komunikasi Politik Tim Elnino Center.

Elnino center adalah tim yang dibentuk untuk kepentingan politik Elnino Mohi. Tim ini beralamat di lingkungan masjid At-Taubah yang berbatasan dengan sipatana dan kota Gorontalo. Adapun strategi politik pencitraan yang dilakukan sejak tahun 2009 yaitu dengan menggunakan lima konsep yaitu 2 diantaranya sebagai berikut:

1. Tim elnino center dalam proses kampanye politiknya melakukan kegiatan berbaur nuansa agama dengan mengangkat topik-topik keislaman baik dari sisi sejarah dan peradaban islam itu sendiri. Strategi ini di lakukan di 427 desa
2. Memberikan fasilitas kelengkapan masjid seperti sound system, jam digital dan fasilitas masjid lainnya. Hal itu bisa di temui di salah satu masjid yang berada di Jl. Arif Rahman Hakim.

Dari dua strategi tersebut memang dalam hitungan politik tidak terlalu menguntungkan namun, penekanannya adalah kita tahu bersama bahwa masjid adalah sentral pertemuan antara umat muslim yang dalam setiap hari pasti bertemu sebanyak lima kali. Tak heran hal itu juga memberikan nilai tambah bagi elektabilitas Elnino Mohi sebagai figur DPR RI. Berikut tabel suara Elnino Mohi dalam perhelatan pemilu 2019.

No.	Perolehan Suara	Asal Partai	Perolehan Suara
1.	Idah Syaidah	Golkar	207. 586
2.	Rahmat Gobel	Nasdem	153. 859
3.	Elnino Mohi	Gerindra	91.711

Dalam memahami konsep politik pencitraan yang dilakukan oleh tim Elnino Center tentu tidak lari dari sebuah konsep teori image building yang dimana konsep pencitraan terbentuk melalui indra yang kemudian dilihat berdasarkan dengan apa yang didengar atau yang disebut dengan (attention filter). Penekanan pada indra yang dimaksud adalah opini yang terbangun dari lingkungan masyarakat terkait figur politik yang mendedikasikan dirinya untuk investasi kebaikan yang memiliki motif politik (Soleman, 2018)

Dalam menyikapi persoalan pencitraan politik di satu sisi secara legal konstitusi merupakan kebebasan berekspresi dalam konteks demokrasi Indonesia saat ini. Oleh karena itu strategi pencitraan merupakan alat politik yang wajar terjadi, dan dibenarkan secara hukum apabila tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Karena konsep pencitraan politik bisa dilakukan kapan saja apabila dalam proses promosi figur politik tidak dilakukan di masa-masa tenang.

Telaah Konsep dan Peran Partisipasi Politik dalam Pendekatan Kebijakan.

Berkenaan dengan strategi politik Elnino Center memberikan sebuah gambaran bahwa konsep peran yang dimainkan dalam masyarakat merupakan hal yang universal dalam politik. Pariata Westa dalam (Hariyanto, 2021) mengemukakan bahwa peranan dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dapat disimpulkan peranan merupakan segala sesuatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk mencapai suatu hal yang telah ditentukan.

Pemerintah dalam peran kebijakan publik merupakan orang yang memiliki kewenangan seseorang yang diwajibkan mampu mengembangkan sistem pemerintahan demokratis yang menjamin hak-hak rakyat terpenuhi, hal tersebut menjadi dasar bagi pemerintah baik pemerintah Indonesia agar mampu menjalankan sistem pemerintahan yang ada agar terciptanya harmonisasi antar masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

Penerapan sistem Demokrasi akan sukses kalau partisipasi masyarakat ditampung oleh pemerintah yang kemudian dituangkan dalam suatu kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan pun harus dikelola dan dijaga oleh pemerintah terkhusus masyarakat yang merasakan manfaat dari kebijakan tersebut. Setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah harus dapat menjawab apa yang menjadi aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah mampu melindungi masyarakat dan memenuhi setiap kebutuhan rakyat dan membatasi yang berkuasa jika mengambil kebijakan sewenang-wenang.

Thomas R. Dye dalam (Mariyati, 2015), mengemukakan kebijakan publik adalah segala sesuatu baik yang dikerjakan maupun tidak dikerjakan oleh pemerintah. Maka dengan demikian pada prinsip utamanya mencakup tujuan, nilai-nilai serta praktek. Disimpulkan bahwa kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut yaitu, a). kebijakan publik memiliki tujuan, nilai serta praktek dalam pelaksanaannya, b). kebijakan publik dibuat oleh pemerintah dan bukan merupakan organisasi swasta, c). kebijakan publik memuat identifikasi dari tujuan yang akan dicapai, memiliki cara dari berbagai langkah untuk mencapai suatu tujuan, d). penyedia dari berbagai masukan guna memungkinkan implementasi secara nyata terlaksana.

PEMBAHASAN

Konsep Politik Pencitraan Sebagai Pertahanan Diri

Pencitraan dalam dunia politik dikenal dengan sebuah istilah pamer atau dalam Bahasa Inggrisnya (*show off*) yang diasumsikan dengan sikap ingin menonjolkan diri dengan cara melebih-lebihkan untuk mendapatkan dukungan dari masa yang dijadikan sebagai objek untuk mendapatkan kekuasaan dengan upaya pendekatan secara emosional (Hendrastomo, 2009) Di sisi lain, (Dachrud, 2018), mengemukakan bahwa

Pencitraan politik adalah cara untuk mendapatkan simpati dari masyarakat dengan cara-cara tertentu yang dimana apa yang dipromosikan ke publik kadang tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan setelah tokoh politik mendapatkan kekuasaan.

Dalam konsep pencitraan politik Nimmo dalam (Soleman, 2018) citra politik dapat memberikan pengaruh pada pengalaman yang diklasifikasikan atas tiga hal yaitu :

1. Citra politik akan memberikan gambaran peristiwa bagi seseorang untuk dapat mengilhami tantangan yang akan dilalui.
2. Citra politik sebagai pondasi dan menjadi tolak ukur bagi elektabilitas kandidat politik
3. Cita politik merupakan sarana penghubung terkait informasi dasar mengenai aktivitas, pekerjaan hingga kepedulian para tokoh politik.

Sedangkan Schweiger (1999) berpendapat mengenai citra politik adalah sebuah gambaran mengenai persepsi dalam menentukan pilihan yang diaktualisasikan melalui konsep program yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan politik pencitraan yang marak terjadi di tempat ibadah telah menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu berimbas terhadap perilaku masyarakat dalam memilih.

Hal itu dikarenakan masjid merupakan tempat yang memiliki keterikatan dengan lingkungan, dari masjid masyarakat juga akan mendapatkan informasi. Artinya penekanan yang dimaksud oleh penulis adalah, lingkungan masjid akan menjadi sasaran politik apabila terus dibiarkan dan disalahgunakan oleh tokoh politik. Berkaitan dengan pengaruh lingkungan terhadap persepsi politik, Ramli Mahmud Dkk (2019), berpendapat bahwa Individu akan lebih cenderung mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan politik melalui lingkungan sosial itu sendiri.

Undang-Undang Pemilu No 8 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Rumah Ibadah Sebagai Tempat Kampanye Politik.

Rumah ibadah adalah wadah dimana berkumpulnya orang-orang untuk melaksanakan ritual ibadah sesuai dengan tuntunan ajaran dan keyakinan masyarakat. Rumah ibadah yang difokuskan oleh penulis disini adalah masjid. Kita tahu bersama bahwa saat ini pembangunan masjid di Indonesia khususnya di provinsi Gorontalo telah banyak di bangun diberbagai tempat dan bahkan di satu desa bisa ada dua masjid

sekaligus yang di bangun. Kehadiran banyak masjid, tentu akan membuka ruang informasi secara instan. hal inilah yang menjadi target-target para tokoh politik untuk meningkatkan elektabilitas mereka. Secara konstitusi dalam UU RI NO 69 tahun 2015 pada huruf (i) menggunakan tempat ibadah dan tempat Pendidikan sebagai sarana kampanye politik. Namun secara konstitusi ini berlaku pada saat pemilu dilaksanakan.

Artinya di luar dari konteks pemilu dalam undang-undang tidak diatur secara spesifik mengenai strategi politik yang menggunakan rumah ibadah seperti halnya yang dilakukan oleh tim elnino center saat ini. namun yang menjadi masalah adalah keterikatan atau (MOU) yang dijalin antara takmir masjid dan elnino center misalnya bantuan jam dinding digital yang bertuliskan elnino center sudah tentu akan terus dipajang meskipun menjelang pemilihan yang akan datang di tahun 2024. Sehingga legitimasi inilah yang membuat.

Sejarah Politik di Rumah Ibadah (masjid) Zaman Klasik dan Modern

Apabila menelisik lebih jauh ke belakang, konsep penggunaan masjid sebagai sarana politik adalah hal yang wajar terjadi namun di ikat dengan aturan-aturan yang berlaku. Diantara aturan itu adalah masjid sebagai sarana tempat untuk bermusyawarah apabila terjadi perbedaan pendapat. Hal itu tentu sangat berbeda dengan era sekarang ini. (R.G., 2017), berpendapat bahwa, terdapat perbedaan di zaman klasik dan modern yang berkaitan dengan rumah ibadah (masjid) sebagai sarana politik yaitu:

1. Masjid pada era klasik selain menjadi tempat ibadah juga menjadi sentral pertemuan kegiatan pertemuan kenegaraan, dan pertemuan politik yang merujuk pada perundingan mengenai konsep dan strategi perang yang berkaitan dengan kejayaan dan kebangkitan islam.
2. Era modern saat ini, masjid saat ini, dari esensi politiknya sering sering disalahgunakan sebagai sarana untuk mempromosikan tokoh politik. Misalnya stiker, poster yang telah menjadi kewajiban bagi setiap masjid apabila masjid tersebut mendapatkan bantuan dari tokoh politik. Dari penjabaran diatas, dapat dipahami bahwa, masjid dijadikan sebagai wadah politik tidak mengalami permasalahan. Apabila memperhatikan kaidah-kaidah dan ketentuan. Oleh karena itu konsep masjid harus berdiri sesuai fungsinya tanpa perlu ada campur tangan politik yang menguntungkan satu pihak.

KESIMPULAN

Sistem demokrasi Indonesia memegang asas kebebasan untuk mengekspresikan hak bagi setiap warga negara. Namun dalam hal ini, secara undang-undang terkait kampanye larangan itu hanya berlaku pada saat menjelang pada pemilihan namun tidak pada pada hari-hari biasa. Oleh karena itu, penulis menekankan didalam tulisan ini, pada prinsipnya masjid adalah tempat ibadah. Esensi dari sebuah masjid merupakan pertemuan antara manusia sebagai "hamba" yang ingin memenuhi kewajibannya kepada sang Maha Pencipta dan bukan untuk bertemu dengan pamflet ataupun poster politik yang telah menjadi panorama baru.

Oleh karena itu, politik pencitraan yang menggunakan rumah ibadah diperlukan perhatian yang cukup serius. Hal ini dikhawatirkan masjid akan menjadi wadah eksploitasi para elit politik yang ingin berkuasa. Karena prinsip dari sebuah kebaikan tidak perlu harus memberikan prasyarat sebagaimana yang dilakukan oleh tim Elnino Center melalui bantuan tetapi menggunakan tagar Elnino. Dalam hal ini juga penulis merekomendasikan agar kiranya dalam aturan UU Pemilu juga memberikan legitimasi kepada figur apabila rumah ibadah (masjid) masih dijadikan sebagai sarana politik pencitraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2013). Hubungan agama dan negara dalam konteks modernisasi politik di era reformasi.
- Azhar, A. (2017). *Pencitraan Politik Elektoral: Kajian Politik Segitiga PAN Dalam Merebut Simpati Masyarakat*. [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/1254/](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/1254/).
- Bashori, K. (2018). Pendidikan politik di era disrupsi. Sukma: Jurnal Pendidikan, 2(2), 287-310.
- Dachrud, M. &. (2018). "Memahami Pencitraan Politik Melalui Pendekatan Mekanisme Pertahanan Diri." *Potret Pemikiran* 19.2 .
- fernandes, a. (2018). Politik Identitas dalam Pemilu 2019 : Proyeksi dan efektivitas.
- habibi, m. (2018). ANALISIS POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA.
- Hariyanto, Y. (2021). *Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur*. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 24.
- Hendrastomo, G. (2009). "DEMOKRASI DAN POLITIK PENCITRAAN PERANG IKLAN POLITIK MENUJU DEMOKRATISASI DI INDONESIA.

- Mariyati, T. (2015). *Strategi Implementasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Percepatan Pengembangan Pengguna Internet. Buletin Pos Dan Telekomunikasi, 11(2), 147.* .
- N, W. P. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum.
- R.G., P. (2017). *Studi Komparatif Terhadap Pendayagunaan Masjid Sebagai Prasarana Kegiatan Politik Pada Era Islam Klasik Dengan Era Islam Modern. Studi Komparatif Terhadap Pendayagunaan Masjid Sebagai Prasarana Kegiatan Politik Pada Era Islam Klasik Dengan Era Islam Moder.*
- Soleman, M. D. (2018). *Memahami Pencitraan Politik Melalui Pendekatan Mekanisme Pertahanan Diri.*
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*
- Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum.
- Yunus, R. M. (2019). ORIENTASI BUDAYA POLITIK PEREMPUAN (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNG Pada Pemilihan Umum 2019).